

## Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Fuandy, Munir. 2017. "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek". Citra Adiya Bakti. Bandung.
- Gardner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*. 7<sup>th</sup> edition. West Publishing Co: St. Paul Minn.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara.
- Subhan, Hadi. 2009. "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan". Sinar Gfarika. Jakarta
- Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.KN. 2019. "Hukum Kepailitan di Indonesia". Ideas Publishing. Gorontalo.

## Jurnal

- Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.3 (2021): 635-656.
- Apriansyah, Muhamad Arief, Joni Emirzon, And Sri Turatmiyah. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha*. Diss. Sriwijaya University, 2021, 17.
- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.2 (2012): 277-294.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. "Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitur." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2019).
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional." *J Trunojoyo* 16.1 (2021): 106
- Butarbutar, Lizy Marchelina. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9.1 (2022): 24-30.
- Budiyono, Tri. "penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dalam masa pandemi covid-19: antara solusi dan jebakan." *Masalah-Masalah Hukum* 50.3 (2021): 232-233.

Djanah, Sitti Nur. "Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19." *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 7.2 (2020): 70-76.

Evi Puspita Sari, "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", *Jurnal Hukum Magnus Opus* Vol 6 No.1: (1)

Fitria, Annisa. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitur Mencegah Kepailitan." *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul* 15.1 (2018): 22-28.

Hadiwidjojo, K. "Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik." *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 7.2 (2016). Hlm 8.

Hariyadi, Hasdi. "Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas." *SIGN Jurnal Hukum* 1.2 (2020): 119-135.

Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.3 (2015): 399-418.

Jazuli, Akhmad. *Telaah atas pengertian utang dalam hukum kepailitan*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004.

Juaningsih, Imas Novita. "Analisis kebijakan PHK bagi para pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia." *Adalah* 4.1 (2020): 189-196.

Kadir, Yunita. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan." *Calyptra* 3.1 (2014): 6-24.

Liem, Tony Dwi Soelistyo. "Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditur." *Maleo Law Journal* 6.1 (2022): 102-103.

Maryono, Antonius Sidik, Ulil Afwa, and Sindy Riani Putri Nurhasanah. "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.4 (2022).

Putri, Retno Karunia, et al. "Efek Pandemi Covid 19: Dampak lonjakan angka PHK terhadap penurunan perekonomian di Indonesia." *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 1.2 (2021): 72-77.

Pratama, Bambang. "Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil." *Jurnal Yudisial* 7.2 (2014): 162.

- Prajogo, Timothius Wilham. "Penyusunan Instrumen Kepailitan atau PKPU Oleh Debitur Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit Dari Lembaga Keuangan." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 4.2 (2018): 194.
- Pratama, Saputra, Kismartini Kismartini, and Amni Zarkasyi Rahman. "Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta." *Journal of Public Policy and Management Review* 10.4 (2021): 59-78.
- Purba, Maranatha, and Bismar Nasution Sunarmi. "Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Pdt. Sus-PKPU/2014)." *Usu Law Journal* 7.2 (2019): 143-145.
- Rahmadiyanti, Rindy Ayu. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Notarius* 8.2 (2015), 252.
- Ram Mohan, M. P. "The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law." *Indian Institute of Management Ahmedabad Working Paper* (2021).
- Rusli, Tami. "Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU yang Berkeadilan." *KEADILAN PROGRESIF* 7.2 (2016).
- Saija, Ronald. "Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga." *Sasi* 24.2 (2019): 114-123.
- Simanungkalit, Wirgha Tommy Boy. "Analisis Yuridis Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst." (2019), 13.
- Sriwijastuti, Sriwijastuti. *Lembaga Pkpu Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitur Terhadap Para Kreditur (Studi Kasus Pada Pt. Anugerah Tiara Sejahtera)*. Diss. Universitas Diponegoro, 2010, 6.
- Saputra, Farhan, And Hapzi Ali. "Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen Poac)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3.3 (2022): 320.
- Sinaga, Niru Anita, And Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7.1 (2018).
- Silalahi, Udin, and Beatrix Tanjung. "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi." *Undang: Jurnal Hukum* 4.2 (2021): 379-382.
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.2 (2021): 326-331.

World Health Organization. "Coronavirus disease (COVID-19), 12 October 2020." (2020).

Melania, Lintang Kenisah. "Bagaimana Kinerja Usaha Menengah Di Masa Pandemi Covid-19?." *Akurasi: Journal Of Accounting And Finance Studies* 4.2 (2021): 210-226.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." *Pranata Hukum* 6.2 (2011), 117.

### Internet

Agus Sahbani, Kini Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kini--putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-asalkan-lt61b9b0007b883?page=2>, diakses pada 2 september 2022

Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5855843/mk-putusan-pailitpkpu-bisa-diajukan-kasasi>, diakses pada 4 september 2022

Dany Saputra, Ini 5 Bansos Pemerintah yang Akan Diberikan pada 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220111/9/1487864/ini-5-bansos-pemerintah-yang-akan-diberikan-pada-2022>, diakses pada 12 september 2022.

Erlangga Djumena, Dampak Pandemi Covid-19 Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah, <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/050800026/dampak-pandemi-covid-19-pemerintah-akui-daya-beli-masyarakat-melemah>, diakses pada 12 september 2022.

Fitri Novia Heriani, Putusan MK Terkait Kasasi Putusan PKPU Bertentangan dengan Semangat PKPU, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-terkait-kasasi-putusan-pkpu-bertentangan-dengan-semangat-pkpu-lt624a9a8482c07>, diakses pada 11 september 2022.

HRS, "Salah Kaprah PKPU oleh Kreditor", <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor-lt520c4b3dd4bc2>, diakses pada 22 februari 2023.

Hamalatul Qur'ani, "Hak Kreditor Ajukan PKPU: Salah Kaprah Memaknai Chapter 11 Bankruptcy Code", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kreditor-ajukan-pkpu--salah-kaprah-memaknai-chapter-11-us-bankruptcy-code-lt5b4dc4c0dea5a/>, diakses pada 13 desember 2022.

Iwan Setiawan, "Perkara Kepailitan dan PKPU melonjak lebih dari 100%", <https://www.gatra.com/news-542417-hukum-kki-perkara-kepailitan-dan-pkpu-melonjak-lebih-dari-100.html>, diakses pada 22 februari 2023.

Khomarul Hidayat, Apindo Usul Tes Insolvensi Jadi Syarat PKPU, <https://nasional.kontan.co.id/news/apindo-usul-tes-insolvensi-jadi-syarat-pkpu-ini-respons-akpi>, diakses pada 2 September 2022.

Letezia Tobing, "Perbedaan Antara Kepailitan dan PKPU", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-dagang-lt50c3529a6061f>, diakses pada 28 februari 2023.

Made Wahyu Arthaluhur, Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120>, diakses pada 11 september 2022.

Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6.1 (2021): 1-19.

Mochamad Januar Rizki, "Melihat Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia Usaha", <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kepailitan-dunia-usaha-lt5f581130731fb/>, diakses pada 13 desember 2022.

Monavia Ayu Rizaty, Jumlah Perkaara PKPU Meningkat Saat Pandemi Covid-19, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 11 september 2022.

Norman Edwin Elnizar, "Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan-lt59f1abb87e6fe>, diakses pada 10 maret 2023.

Pokrol, "Bisakah Ajukan Permohonan Pailit Jika Ada Klausula Arbitrase?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-dan-arbitrase-1-cl808>, diakses pada 12 september 2022.

Rifani, Ratu Alawiyyah, dan Muhammad Fahrudin. "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3.2 (2021): 145-160.

Rizky Dwinanto, 2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a>, diakses pada 6 september 2022

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list\\_perkara/page/1/Q0liTGVvaHkvbWllbHFzbER3aFdnTkRPUYzRHM5dU1wS0RYd3FuYXZMOSthcDl6cWg4RzJ5VXFYYldSR2k1czlWZFZpeHRmSGU4ZDJjalM5NmJEUnc9PQ==/key/col/2](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/1/Q0liTGVvaHkvbWllbHFzbER3aFdnTkRPUYzRHM5dU1wS0RYd3FuYXZMOSthcDl6cWg4RzJ5VXFYYldSR2k1czlWZFZpeHRmSGU4ZDJjalM5NmJEUnc9PQ==/key/col/2), diakses pada 21 september 2022

Safir Mukri, "Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 2,07 Persen pada 2020," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206080350-532-603013/penyebab-pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-207-persen-pada-2020>, diakses pada 2 september 2022.

Syahrizal Sidik, "Alasan Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210103211859-4-213165/alasan-anies-perpanjang-psbb-transisi-dki-jakarta>, diakses pada 21 februari 2023.

Šverko Grdić, Zvonimira, Marinela Krstinić Nižić, and Maja Mamula. "Insolvency in the Republic of Croatia." *Economic research-Ekonomska istraživanja* 30.1 (2017): 1693-1704.

Utami Argawati, "Menyoal Ketiadaan Kasasi dalam Putusan Kepailitan", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17359&menu=2>, diakses pada 27 januari 2023.

Yenni Ratna Pratiwi, Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>, diakses pada 12 september 2022.

Yudho Winarto, "Putusan MK Terkait Pailit & PKPU Dinilai Tak Berikan Keadilan Bagi Para Kreditur, <https://nasional.kontan.co.id/news/Putusan-MK-Terkait-Pailit-Dan-PKPU-Dinilai-Tak-Berikan-Keadilan-Bagi-Para-Kreditur>, diakses pada 17 Januari 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan *Lembaran Negara* Nomor 4443).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

### **Tesis dan Disertasi**

Halim, Linda. *Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2008.

Pramudya, Ardhita. *Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Di Indonesia*. Diss. Universitas Airlangga, 2017.



Nuswanto, Rochsian. *Restrukturisasi Utang Dalam Kepailitan*. Diss. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.

Soelistyo, Liem Tony Dwi. *Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditur*. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Syabani, Andis Rab. *Analisis Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 Melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Ivory Aurelia Putri., Legal pada PT Pegasus Air Services, pada tanggal 9 April 2023 melalui Zoom Meeting.

Hasil wawancara dengan Muhammad Bagas Amirul., Pengacara pada Siregar Setiawan Manalu & Partners, pada tanggal 29 April 2023 melalui Zoom Meeting.